

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sebagian besar menganut ajaran agama islam. Masyarakat muslim merupakan pangsa pasar utama di negeri ini, dengan jumlah penduduk mayoritas beragama islam, maka sudah sewajarnya hak-hak mereka sebagai konsumen mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah melalui berbagai produk perundang-undangan. Bagi umat islam, mengkonsumsi produk pangan yang halal merupakan suatu kebutuhan yang mutlak karena merupakan perintah dalam agama islam, tidak hanya bersifat anjuran tapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan¹. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 88 “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rejekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Bagi seorang muslim, mengkonsumsi produk yang tidak halal dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung, di dunia maupun di akhirat serta dapat berujung kerugian lahir dan batin. Sa'id Hawwa menjelaskan bahwa, diantara hal-hal yang membatalkan syahadatain adalah mengharamkan apa yang diharamkan Allah secara qath'I (pasti), tanpa ada khilaf di kalangan para mujtahid juga mengharamkan apa yang dihalalkan Allah secara qath'i. dampak yang ditimbulkan langsung akibat makanan haram diantaranya memberikan dampak bagi kesehatan, tidak diterima amalannya, tidak terkabulnya doa, mengikis

¹ Bahrul, *Halal Pelindung Akidah Umat*, <http://pkesinteraktif.com/lifestyle/halal>, diunduh 12 November 2016

keimanan pelakunya, mencampakkan pelakunya ke neraka, mengeraskan hati. Sedangkan dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung diantaranya haji dari harta haram tertolak, sedekahnya ditolak, sholatnya tidak diterima serta silaturahmi sia-sia².

Islam memberikan penjelasan mengenai persoalan mana saja yang halal dan yang haram, seperti yang diatur dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 173 yang menjelaskan secara tegas mengenai empat jenis makanan yang haram dikonsumsi diantaranya bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Di luar itu, hadist Nabi SAW menambahkan beberapa jenis binatang yang haram dikonsumsi seperti binatang buas yang bertaring, berkuku tajam, binatang yang hidup di dua alam, potongan dari binatang yang masih hidup, dan sebagainya. Ketentuan tersebut harus ditaati dan dipedomani oleh setiap muslim dalam mengonsumsi makanan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang diterapkan dalam proses produksi atas barang dan jasa, maka timbul suatu masalah bahwa konsumen memiliki keterbatasan untuk mengetahui kebenaran informasi yang ada pada produk yang akan dikonsumsi. Informasi yang dimaksud adalah mengenai kebenaran akan bahan-bahan dari produk konsumsi yang bersangkutan, secara mutlak harus ada dalam label kemasan produk atau etiket lain yang jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Dari hal tersebut timbul suatu keraguan atas keamanan dan kenyamanan dari barang yang dikonsumsi karena kemungkinan

² Nur Fahmi, *Hak Atas Kehalalan Produk Makanan, Minuman, Obat-obatan, Dan Kosmetik bagi Umat Islam Di Indonesia*, Skripsi: FH UI, 2011 *Umat Islam Di Indonesia*, Skripsi: FH UI, 2011, hlm. 55

pada pembuatannya, bahan-bahan produksinya, hingga pengemasan ataupun hasil akhir dari proses produksi mengandung suatu zat atau bahan yang tidak dibenarkan hukum agama, maka disini perlu adanya informasi atas kehalalan yang termuat dalam label halal pada produk yang bersangkutan.

Label merupakan alat penyampaian informasi tentang produk yang tercantum pada kemasan. Selain memberikan informasi mengenai nama produk, label juga memberikan informasi daftar bahan yang terkandung dalam produk, berat bersih, daya tahan, nilai ataupun kegunaan produk serta keterangan tentang halal. Pencantuman tulisan halal diatur oleh Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No 427/MENKES/SKB/VIII/1985. Makanan halal adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram atau yang diolah menurut hukum islam. Produsen yang mencantumkan tulisan halal pada label bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut.

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan. Sertifikat halal pada produk makanan yang menjadi konsumsi masyarakat merupakan salah satu upaya perlindungan pemerintah terhadap masyarakat secara umum. Masalah kehalalan bukan ditilik dari bahannya semata, tetapi juga dari proses pengolahan yang bercampur dengan aneka bahan tambahan hingga tahap pengemasan yang masih kritis tercampur dengan bahan-bahan tidak halal. Dalam hal inilah diperlukan label halal yang terpercaya, yang dapat memberikan ketentraman bagi konsumen untuk mengkonsumsi makanan halal. Namun dalam praktek di

lapangan, tanda halal yang sudah ada pun sering di salah gunakan oleh pelaku usaha demi menarik minat konsumen. Manipulasi yang sering dilakukan adalah dengan mencantumkan tanda halal padahal belum pernah diperiksa oleh lembaga yang berkompeten atau produk tersebut sebelumnya sudah diperiksa namun dalam penerapan selanjutnya produsen berbuat curang dengan cara menambahkan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan atau haram.

Sebagai Negara berpenduduk mayoritas beragama islam, istilah halal sudah tentu bukan hal yang tabu, pemahaman untuk mengkonsumsi makanan yang halal dalam persepsi sebagian besar masyarakat muslim Indonesia sudah dikenalkan sejak dini³. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik produk tersebut berupa makanan, obat-obatan maupun barang konsumsi lainnya. Merujuk pada konstitusi kita, pasal 28 E ayat (1) dan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang dasar 1945 secara mutatis mutandis “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Begitu juga dengan penduduk muslim Indonesia, mereka memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap kehalalan produk sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu, mereka perlu diberi perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan pangan yang di konsumsi dan produk lain yang digunakan⁴.

³ Diah Setiari Suhodo, *Peluang Usaha Produk Halal Di Pasar Global Perilaku Konsumen Muslim Dalam Konsumsi Makanan Halal*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009, hlm. 19.

⁴Purwanti Paju, *Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 5/Juli, 2016, hlm. 110

Hal ini sejalan dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 yang diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, terutama atas kenyamanan (tidak menimbulkan keraguan) dalam mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan keyakinannya. Sehingga berdasarkan Undang-Undang ini dijelaskan bahwa setiap produsen harus secara transparan mencantumkan unsure-unsur setiap makanan yang diproduksi untuk melindungi kepentingan konsumen⁵.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah memberikan perlindungan kepada konsumen muslim terkait dengan produk halal, yaitu terdapat dalam pasal 8 ayat (1) huruf h yang berbunyi bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”. Isi dari pasal tersebut telah jelas bahwa pelaku usaha harus mengikuti ketentuan yang ada sebelum memperdagangkan produknya ke pasaran.

Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Berdasarkan pasal tersebut semua produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Adanya kewajiban sertifikat halal pada

⁵ Siti Muslimah, *Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim*, Jurnal Yustisia Edisi 83 Mei-Agustus, 2011, hlm. 20

produknya, secara tidak langsung pelaku usaha dituntut untuk menyediakan dan memperdagangkan produk yang halal dimana setelah melakukan sertifikasi halal pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada setiap produk yang dihasilkan.

Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI harus bertanggung jawab dalam menjaga produknya agar tetap halal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal pasal 25 huruf b yang berbunyi “menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal” dan pasal 25 huruf c bahwa pelaku usaha harus “memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal”.

Salah satu bentuk perwujudan dari hak konsumen atas informasi yang benar mengenai jaminan barang dan/atau jasa adalah pencantuman label halal, yang mana diatur dalam pasal 97 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai halal bagi yang dipersyaratkan mengingat label halal tersebut mempunyai peranan penting bagi masyarakat muslim di Indonesia⁶. Secara detail, labelisasi halal juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pasal 2 ayat 1 “bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah

⁶ Nidya Sifana R, et all, *Kesadaran Hukum Konsumen Atas Informasi Label Halal Pada Pangan Di Surabaya*, Artikel Ilmiah: UNESA, 2015, hlm. 2

Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan/atau di kemasan pangan”.

Adanya peredaran produk pangan dalam kemasan yang memasang label tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan sangat meresahkan konsumen, seperti kasus yang terjadi di Surabaya dimana BPOM mengadakan pengujian terhadap 35 merek dendeng/abon sapi, dari 15 dendeng dan 20 abon menemukan sebanyak 5 merek dendeng positif DNA babi, pada dendeng dan abon daging babi dikemas dan ditulis bahan dari daging sapi, bahkan terdapat cap halal pada bungkus kemasan tersebut. Kasus bakso mengandung daging babi di Bandung (2014), kemasan daging babi yang dilumuri dengan darah sapi di Bandung⁷, kasus dendeng sapi yang dicampur dengan daging babi di Jakarta⁸.

Masyarakat sebagai konsumen sering merasa tertipu karena telah membeli produk dalam kemasan yang bertuliskan halal, namun kenyataannya belum memperoleh sertifikat halal dari MUI maupun legislasi dari pemerintah ataupun awalnya mendaftarkan produknya tersebut dengan bahan-bahan yang diperbolehkan dalam islam namun setelah mendapatkan label, bahan-bahan yang digunakan untuk produksi diganti dengan bahan makanan haram. Sehingga produk tersebut masih menimbulkan keraguan atas kehalalannya di kalangan konsumen. dalam ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, pencantuman label atau tanda halal pada kemasan produk harus dengan izin resmi pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin dari BPOM untuk mencantumkan label atau tanda halal harus didasarkan

⁷ Putusan No. 706/Pid.B/2015/PN.Bdg

⁸ Putusan No. 295/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

pada sertifikat halal dari MUI. Dimana sertifikat halal tersebut diperoleh melalui pemeriksaan dan proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan memang benar-benar halal, bukan hanya halal pada saat pengajuan dan diaudit/diperiksa oleh LPPOM MUI.

Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha masih rendah dalam pentingnya memperhatikan hak-hak konsumen dan pemahaman produk yang dikonsumsi tersebut dengan kurang menghiraukan apakah produk yang mereka konsumsi benar-benar halal atau masih menimbulkan keragu-raguan. Adanya permasalahan mengenai kehalalan produk yang beredar di pasaran Indonesia juga memperlihatkan masih lemahnya pengawasan dari pemerintah maupun lembaga terkait dalam mengawasi peredaran produk yang beredar. Perlu diketahui juga bahwa asas sertifikasi dan labelisasi produk halal di Indonesia masih bersifat sukarela (voluntary) bukan bersifat wajib (mandatory).

Melihat juga pada era pasar bebas, sejumlah produk yang berasal dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Dengan adanya lembaga sertifikasi halal dan labelisasi halal di luar negeri yang memberikan sertifikat dan label halal atas produk impor yang masuk ke dalam negeri yang menimbulkan pertanyaan mengenai kebenaran dan keabsahan produk tersebut benar-benar halal. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam melindungi hak konsumen khususnya konsumen muslim untuk memperoleh kejelasan kehalalan produk,

dimana harus ada filter atau penyaring dalam bentuk aturan dan pelaksanaan yang tegas dan efektif dari sertifikasi dan labelisasi atas produk pangan.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang jaminan Produk Halal telah mempresentasikan tanggung jawab negara, khususnya terhadap umat islam untuk melindungi dan memberikan rasa tenang dan aman dalam mengkonsumsi/menggunakan produk yang sesuai syariat yakni halal dan thayyib. Selain itu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya produk halal dan kewajiban produsen untuk memberikan jaminan kehalalan produk. Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini setidaknya dapat menjadi landasan hukum tentang sistem informasi produk halal sebagai pedoman pelaku usaha dan masyarakat⁹.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “PERAN BPOM DAN LPPOM MUI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PANGAN KEMASAN YANG BERLABEL HALAL (Studi di BPOM dan LPPOM MUI Surabaya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan pencantuman label halal pada suatu produk makanan?

⁹Hijrah Lahaling, et all, *Hakikat labelisasi Halal Terhadap Perlindungan konsumen Di Indonesia*, Jurnal Hasanuddin Law Review Vol. 1 Issue 2, Agustus 2015, hlm. 285

2. Bagaimana peran LPPOM MUI dan BPOM dalam hal pengawasan terhadap Sertifikasi Halal dan Labeling produk makanan?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang penting keberadaannya dalam menentukan awal penelitian yang ingin dicapai dari permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan pencantuman label halal pada suatu produk makanan;
- b. Untuk mengetahui peran LPPOM MUI dan BPOM dalam hal pengawasan terhadap sertifikasi dan labeling produk makanan.

2. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menguji teori terhadap perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan pencantuman label halal pada suatu produk makanan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran khususnya bagi mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terhadap permasalahan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan pencantuman label halal pada suatu produk makanan, selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau untuk bahan penelitian lanjutan bagi yang membutuhkan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan masyarakat sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan mengenai adanya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan pencantuman label halal pada suatu produk makanan, sehingga masyarakat dapat mensosialisasikan dan memilih secara bijak dalam pembelian suatu produk.

3. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan maupun referensi untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan

perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan pencantuman label halal pada suatu produk makanan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dipaparkan sebagai berikut, yuridis adalah sesuatu yang sudah terjamin kebenarannya dan terbukti secara hukum adanya. Sedangkan sosiologis adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta social, dimana fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Sehingga yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan memaparkan suatu fakta atau kenyataan yang terjadi di masyarakat yakni memberikan paparan yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat dalam masyarakat. Studi yang demikian itu, hukum tidak dikonsepskan sebagai gejala normatif yang otonomi (seperti *study law in books*) tetapi hukum dikonsepskan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variable-variable sosial yang lain. Dimana secara yuridis peneliti berpedoman pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan sosiologis berorientasi pada studi lapang di BPOM dan LPPOM MUI Jawa Timur, yang nantinya dalam studi lapang ini akan diperoleh data-data yang

dipergunakan untuk menjelaskan terkait permasalahan yang akan penulis angkat yaitu mengenai Peran BPOM dan LPPOM MUI dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen Pangan Kemasan Yang Berlabel Halal.

2. Lokasi penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di BPOM yang terletak di Jl. Karangmenjangan No. 20 Surabaya dan LPPOM MUI Jawa Timur yang terletak di Jl. Dharmahusada Selatan No. 5 Surabaya. Hal ini dikarenakan penulis ingin melihat bentuk pembinaan serta pengawasan lembaga terkait dalam melaksanakan tugasnya terkait proses sertifikasi dan labelisasi halal pada suatu produk makanan serta jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan produknya sangat besar dibandingkan provinsi lainnya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah jenis data primer yang langsung dari sumber utama tanpa adanya perantara, yang didapat melalui proses interview/wawancara pada tempat yang diteliti, data utama yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara. Maka data primer dari penelitian ini diperoleh dari:

- 1) Hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Prof. Dr. H Sugiyanto, M.S selaku Ketua Umum Pengurus Harian LPPOM MUI dan Dra. Retno Chatulistiani P,Apt selaku Kabid Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BPOM Surabaya;
 - 2) Dokumen dari lokasi penelitian meliputi foto, bagan struktur LPPOM MUI dan BPOM Surabaya, serta dokumen lain yang mendukung validitas dari penelitian ini;
 - 3) Hasil observasi produk pangan kemasan yang diedarkan di pasaran.
- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari rujukan yang secara umum memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat, seperti:

- 1) Al-Quran;
- 2) Hadist;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Selain itu, sumber data sekunder juga berasal dari bahan pustaka yang mencakup literature beberapa buku atau artikel yang terkait dengan persoalan sertifikasi halal, labelisasi dan juga perlindungan konsumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dioertanggungjawabkan, cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab secara langsung dilakukan dengan responden sebagai berikut:

- 1) Dra. Retno Chatulistiani P,Apt selaku Kabid Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BPOM Surabaya;
- 2) Prof. Dr. H Sugiyanto, M.S selaku Ketua Umum Pengurus Harian LPPOM MUI.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan sertifikasi halal dan labelisasi seperti gambar, grafik, struktur organisasi, data, form pendaftaran, dll.

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif¹⁰. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari fakta-fakta, data-data, dokumen, serta arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis maupun disertasi, peraturan perundang-undangan, ketetapan, ensiklopedia dan sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mempelajari dan mengkaji perundang-undangan, jurnal, literature atau dokumen yang terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan pencantuman label halal pada suatu produk makanan.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, metode penalaran yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis kritis yaitu metode yang mendeskripsikan gagasan manusia dengan suatu analisis yang bersifat kritis.

¹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta, 1997, hlm. 77

Setelah memperoleh dan mendeskripsikan fakta tentang upaya perlindungan bagi konsumen terhadap penyalahgunaan pencantuman label halal serta peran BPOM dan LPPOM MUI dalam hal pengawasan terhadap sertifikasi halal dan labelisasi, maka selanjutnya penulis akan mengaitkan dan menganalisa dengan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan peraturan lain yang terkait, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

